

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini memuat teori dan konsep yang diperoleh dengan menggeneralisasikan hasil penelitian sebelumnya, yang dapat dijadikan landasan teori dalam bentuk asumsi terkait mengenai Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba. Hal ini didasarkan pernyataan Kajian Pustaka menurut Sugiyono (2016:87):

“Tinjauan pustaka atau Kajian Pustaka adalah peninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tinjauan pustaka maka peneliti akan semakin banyak mengetahui tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti dapat memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian sebelumnya.”

Menurut Toharudin (2021:40) kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh – sungguh tentang teori – teori dan konsep – konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

Tinjauan pustaka adalah uraian deskripsi literatur yang terkait dengan bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka memberikan gambaran tentang apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori dan hipotesis yang mendukung, lalu permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metodologi yang sesuai (Yusuf, Khasanan 2019).

2.1.1 Beban Pajak Tangguhan

Dilihat dari sudut pandang perpajakan, pajak tangguhan atau disebut deferred tax expense merupakan beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di masa yang akan datang.

2.1.1.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2011:115) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan liabilitas atau aset pajak tangguhan (Waluyo, 2014:276). Menurut Muhammad Arsyad, dkk (2022:69) Pajak tangguhan adalah beban pajak yang dapat memberi pengaruh, baik penambahan atau pengurangan, terhadap pajak di masa yang akan datang jika dilihat dari sudut pandang perpajakan, sementara dari sudut pandang akuntansi, pajak yang ditangguhkan dapat didefinisikan sudut pandang aset atau liabilitas.

Menurut Diana Sari (2014:289) pajak tangguhan adalah perbedaan yang terjadi akibat PPh terutang dengan beban pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer. Menurut Baraja, Basri dan Sasmi (2019) Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Harnanto (2013) mendefinisikan beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul karena perbedaan laba dalam laporan keuangan akuntansi untuk kepentingan eksternal dengan laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan perpajakan.

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara fiskal dan komersial, beban pajak tersebut akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di masa depan.

2.1.1.2 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Secara sederhana, pajak tangguhan didefinisikan sebagai pajak yang timbul karena adanya perbedaan diantara peraturan perpajakan (fiscal) dan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan inilah yang menyebabkan pendapatan atau beban yang sudah diakui pada masing – masing berbeda.

Menurut Waluyo (2012:28) Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan bagian dalam

menyusun beban pajak penghasilan yang timbul ketika nilai laba pada laporan fiskal lebih rendah dibandingkan dengan nilai laba yang ada pada laporan komersial (Kusumawati, 2020). Menurut Putra (2019) Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Menurut Harnanto (2011:115) perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperoleh menurut pajak. Perhitungan tentang pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset. Hal itu dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai terhitung dengan proporsional (Harnanto, 2011:115).

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } t-1}$$

Harnanto (2011:115)

Keterangan:

DTE_{it} = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

TA_{i t-1} = Total asset perusahaan i pada tahun t-1.

Menurut Perkasa dan Wijaya (2015) Konsolidasi adalah Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan (entitas pengendali) dan satu atau lebih anak perusahaan (entitas yang dikendalikan)

seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan.

2.1.2 Aset Pajak Tangguhan

Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar, apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset.

2.1.2.1 Pengertian Aset Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2014:107) aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi karena perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang – undang pajak. Menurut Thobias (2023:2018) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
- b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan
- c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Menurut Muhammad Arsyad (2022:69) aset pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Aktiva pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aktiva pajak tagguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan judgment untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan (Waluyo, 2008).

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi. Menurut Simanjuntak (2022) aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi jika perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi akibat laba akuntansi lebih besar dibandingkan laba fiscal yang diakibatkan perbedaan temporer.

2.1.2.2 Indikator Aset Pajak Tangguhan

Pengukuran aktiva pajak tangguhan didasarkan pajak yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen – elemen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan disatu pihak

dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan di pihak lain.

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebab adanya akibat perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan yang mengizinkan menurut PSAK 46 Revisi Tahun 2018 mengenai pajak tangguhan (IAI, 2018). Adapun rumus menghitung aset pajak tangguhan menurut Waluyo (2014:107) rumusnya adalah:

$$CAPT_i = \frac{\Delta \text{aktiva pajak tangguhan } it}{\text{aktiva pajak tangguhan } t}$$

Sumber: Waluyo (2014:107)

Keterangan:

APT I = aset pajak tangguhan perusahaan I pada tahun t

Selisih antara aset pajak tangguhan periode sekarang dan periode yang lalu, sehingga dalam penelitian ini aset pajak tangguhan sebagai variabel bebas diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada periode t.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat mencerminkan besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat baik dari besar kecilnya perusahaan maupun besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, frekuensi penjualan, pangsa pasar dan faktor lainnya, perusahaan besar menciptakan kesan kepastian atau kelangsungan

operasi yang lebih besar daripada usaha kecil dan mendapatkan pembiayaan juga lebih mudah mendapatkan pembiayaan eksternal.

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Nagian Toni et al, (2021:33) Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.”

Definisi ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston (2011:331) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total asset dan total ekuitas. Menurut Hartono (2008:254) definisi ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut Sudarno (2022:109) ukuran perusahaan merupakan nilai yang memberitahukan besar kecilnya perusahaan. Terdapat banyak proksi yang bisa dipakai untuk mewakili ukuran perusahaan yakni jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, total penjualan dan yang lain semuanya berkorelasi tinggi.

Menurut Sitanggang dan Purba (2022) ukuran perusahaan (size) adalah suatu skala pengukuran besar dan kecilnya perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset, atau log size dari total penjual dalam satu periode akuntansi. Menurut Lela Nurlaela (2019:31) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya usatu perusahaan yang dapat ditujukan dengan total aktiva, total penjualan, rata – rata tingkat penjualan dan rata – rata total aktiva. Ukuran perusahaan terbagi

menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aktiva perusahaan.

2.1.3.2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 tahun 2008 dibagi kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 100 Juta	>300 Juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>100 Juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

2.1.3.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan total volume neraca, volume penjualan, rata-rata total omset, dan rata-rata total omset yang dijelaskan oleh ukuran perusahaan. Menurut Aminah dan Zulaikha (2019) Ukuran perusahaan merupakan perbandingan ukuran perusahaan yang dilihat dari profitabilitas perusahaan. Ukuran perusahaan yang lebih besar juga dapat mempengaruhi kompleksitas perusahaan. Menurut Sari Khafid (2020) ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan.

Menurut Arthawan & Wirasedana (2018) Ukuran perusahaan merupakan jenjang dalam mengidentifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan, ukuran perusahaan bisa ditentukan berdasarkan pada jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, total nilai aktiva dan total penjualan. Secara umum ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Asset}$$

Sumber: Brigham dan Houston (2011:331)

Aset atau aktiva merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan agar terciptanya tujuan perusahaan yang salah satunya adalah memperoleh keuntungan atau laba.

2.1.4 Manajemen Laba

Laba dapat menjadi indikator efisiensi yang dilakukan manajemen dalam menggunakan dana. Investor menjadikan informasi laba sebagai indikator penting dalam mengambil keputusan investasi. Informasi laba selaku bagian dari laporan keuangan biasanya menjadi target rekayasa menggunakan langkah oportunistis dari pihak manajemen dalam memaksimalkan kepentingannya, yang dimana hal seperti ini dapat membuat rugi pihak pemegang saham maupun investor.

2.1.4.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut R.A Supriyono (2018:123) menyatakan manajemen laba adalah semua tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk mempengaruhi laba dengan cara meninggi – niggikan atau merendah – rendahkan laba sesuai dengan

tujuannya. Adapun Islahuzzaman (2012:257) mendefinisikan manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi”.

Sedangkan menurut Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Harnanto (2013:115) mendefinisikan manajemen laba adalah upaya memanfaatkan (perubahan) ketentuan perundang-undangan perpajakan dan standar atau metode akuntansi untuk memperoleh penghematan atau meminimalisasi beban pajak. Definisi manajemen laba menurut Scott (2015) adalah pilihan manager terhadap kebijakan akuntansi atau tindakan yang nyata – nyata dilakukan oleh manajer sehingga mempengaruhi laba, guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan. Menurut Sri Sulityanto (2018) manajemen laba adalah Tindakan untuk menambah, mengurangi, atau menyamakan laba dalam laporan keuangan. Menurut Mayndarto dan Murnawangsih (2021) manajemen laba adalah suatu proses campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk kepentingan diri sendiri (perusahaan). Menurut Tarmidi dan Murwaningsih (2019) manajemen laba adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola laba perusahaan agar tampak “indah” baik secara wajar maupun tidak wajar atau manipulasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajemen, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

2.1.4.2 Pola Manajemen Laba

Adapun menurut Subramanyam dan Wild (2014:131) menyebutkan bahwa ada tiga pola pada manajemen laba diantaranya adalah sebagai berikut:

1) **Manajer meningkatkan laba (Increasing income)**

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga meningkatkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual ini, sehingga meningkatkan laba.

2) **Manajer melakukan “mandi besar” (big bath) melalui pengurangan laba periode ini.**

Dalam strategi big bath dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger atau restrukturisasi. Strategi ini juga sering dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

3) **Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (income smooting)**

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan strategi bentuk manajemen laba ini.

2.1.4.3 Indikator Manajemen Laba

Menurut Rachmawati (2020) manajemen laba dapat didefinisikan sebagai situasi di mana manajer memanipulasi laporan keuangan menggunakan penilaian akuntansi mereka dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan maksud memberikan informasi yang menyesatkan tentang kinerja perusahaan kepada beberapa pemangku kepentingan.

Menurut Anthonius dan Murwaningsih (2018) manajemen laba adalah suatu kebijakan akuntansi, Tindakan nyata, yang mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan tertentu dalam melaporkan laba yang dibuat oleh manajer. Adapun menurut Gulo dan Mappadang (2022) mendefinisikan *earnings management* adalah salah satu cara rekayasa yang dilakukan manajer perusahaan dalam mengelola laba perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan laba (*income increasing*) maupun membuat laba menurun (*income decreasing*). Menurut Kasmir (2016: 303) laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Menurut Sri Sulistyanto (2008:165)

1) Menentukan nilai Total Accrual (TAC):

$$\text{TAC} = \text{NIit} - \text{CFOit}$$

- 2) Total Accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary Least Square)

$$\text{TAit/Ait-1} = \beta_1 (1/\text{Ait-1}) + \beta_2 (\Delta\text{REVit/Ait-1}) + \beta_3 (\text{PPEit/Ait-1})$$

- 3) Menghitung Non Discretionary Accruals (NDAC) sebagai berikut:

$$\text{NDAit} = \beta_1(1/\text{TAit-1}) + \beta_2 ((\Delta\text{REVit} - \Delta\text{RECit}) / \text{TAit-1}) + \beta_3(\text{PPEit} / \text{TAit} / \text{TAit-1}) + \epsilon_{it}$$

- 4) Menghitung nilai DACC discretionary accrual sebagai berikut:

$$\text{DACit} = [\text{TACAit} - 1/1] - \text{NDACit}$$

Keterangan:

TA = Total Akruar

NIit = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan i pada tahun t

CFOit = Arus Kas dari operasi (*Cash Flow from operation*) pada tahun t

Ait-1 = Total aset perusahaan ipada tahun t sebelumnya

ΔREVit = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

ΔRECit = Perubahabn piutang perusahaan i pada tahun t

PPEit = *Property, plant and equipment* perusahaan I pada tahun t

2.2 Kerangka Pemikiran

Manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan, baik itu menambah atau mengurangi laba pada laporan keuangan. Manajemen laba bukan suatu kecurangan yang berbahaya. Namun manajemen laba seringkali membuat informasi yang diperoleh tidak mencerminkan

posisi perusahaan yang sebenarnya, terkadang hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu, sehingga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya manajemen laba, Beban pajak tangguhan salah satu misalnya. Beban pajak tangguhan adalah adalah beban pajak atau manfaat pajak yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di masa depan. Pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara fiskal dan peraturan komersial. Namun yang terjadi pada umumnya, perusahaan yang memiliki beban pajak terlalu besar akan semakin tinggi berupaya melakukan kebijakan dalam hal penginformasian laba.

Aset pajak tangguhan juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Rendahnya pembayaran pajak penghasilan pada periode saat ini namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa yang akan datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak lebih besar sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Keterlibatan ukuran perusahaan dengan manajemen laba adalah semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar pula paksaan yang dihadapi karena perusahaan tersebut akan menjadi sorotan dan pengawasan sehingga manajer tidak bisa leluasa melakukan penerapan manajemen laba. Jadi semakin kecil ukuran perusahaan manajer semakin memiliki peluang dalam melakukan manajemen laba.

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak Tanggahan Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah laba akuntansi dengan beban pajak tanggahan. Ketika manajer menginginkan keuntungan kecil yang dilaporkan maka dia mengakui adanya beban pajak tanggahan. sebaliknya jika manajer menginginkan laba yang dilaporkan lebih tinggi daripada yang dia inginkan untuk mengakui pajak tanggahan yang sesuai untuk memungkinkan mereka untuk melakukannya mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi, besarnya pajak tanggahan yang dilaporkan perusahaan dapat mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan manajer. Semakin besar presentase beban pajak tanggahan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin mengikat, sehingga sulit bagi perusahaan melakukan manajemen laba (Yulianti 2005:118).

Menurut Phillips et al. (2003) menyebutkan bahwa beban pajak tanggahan dapat digunakan untuk mengetahui adanya perilaku manajemen laba dalam rangka untuk menghindari penurunan laba, menghindari kerugian, dan menghindari gagal mencapai target laba para analis. Penelitian Phillips et al (2003) menemukan bahwa beban pajak tanggahan terbukti dapat mendeteksi perilaku manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Menurut Hery (2015:51) beban pajak tanggahan merupakan selisih antara laba yang dimiliki perusahaan dengan laba fiskal yang harus direncanakan agar meningkatkan manajemen laba suatu perusahaan.

Pernyataan – pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baraja dkk (2019), Septianingrum dan

Damayanti (2022), Devitasari (2022) hasil penelitian Baraja, Basri Dan Sismi (2019) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan memiliki nilai positif signifikan yang berarti variabel beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. Hasil penelitian Septianingrum dan Damayanti (2022) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba artinya semakin besar nilai beban pajak tangguhan yang terdapat di laporan keuangan maka dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. Pada penelitian Devitasari (2022) menyimpulkan earnings management dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *deferred tax expense*.

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan adalah efek yang timbul dari pajak penghasilan masa depan tetapi dipengaruhi oleh perbedaan waktu antara akuntansi dan perpajakan dan rugi pajak yang mungkin berlipat ganda di periode akuntansi mendatang. Di masa depan, pengaruh pajak penghasilan harus diakui, dihitung, disajikan dan disajikan baik dalam neraca maupun laporan laba rugi dalam laporan keuangan. Perusahaan mungkin membayar lebih sedikit pajak hari ini, tetapi berpotensi membayar lebih banyak pajak di masa depan. Atau, sebaliknya, sebuah perusahaan mungkin membayar lebih banyak pajak sekarang, tetapi sebenarnya memiliki kewajiban pajak yang lebih kecil di masa depan.

Menurut Sri Sulistyanto (2013:56) pajak yang ditangguhkan menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba.

Pernyataan – pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baraja, Basri Dan Sasmi (2019), Sutadipraja dan Ningsih (2019), Simanjuntak (2022). Berdasarkan hasil penelitian Baraja, Basri Dan Sasmi (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aktiva pajak tangguhan memiliki nilai positif signifikan yang berarti variabel aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian Sutadipraja dan Ningsih (2019) aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut merepresentasikan bahwa aset pajak tangguhan dapat dijadikan celah untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Simanjuntak (2022) menunjukkan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan dapat diterima. Hal ini menunjukkan semakin besar aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, maka semakin mengidentifikasi bahwa manajemen sedang menjalankan perlakuan aset pajak tangguhan.

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai skala yang memeringkatkan ukuran perusahaan dalam berbagai hal, antara lain total aset, total

penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Suatu perusahaan yang lebih besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan disini sangat mempengaruhi terjadinya manajemen laba karena semakin besar suatu perusahaan harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber – sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165)

Menurut Jogiyanto (2011:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

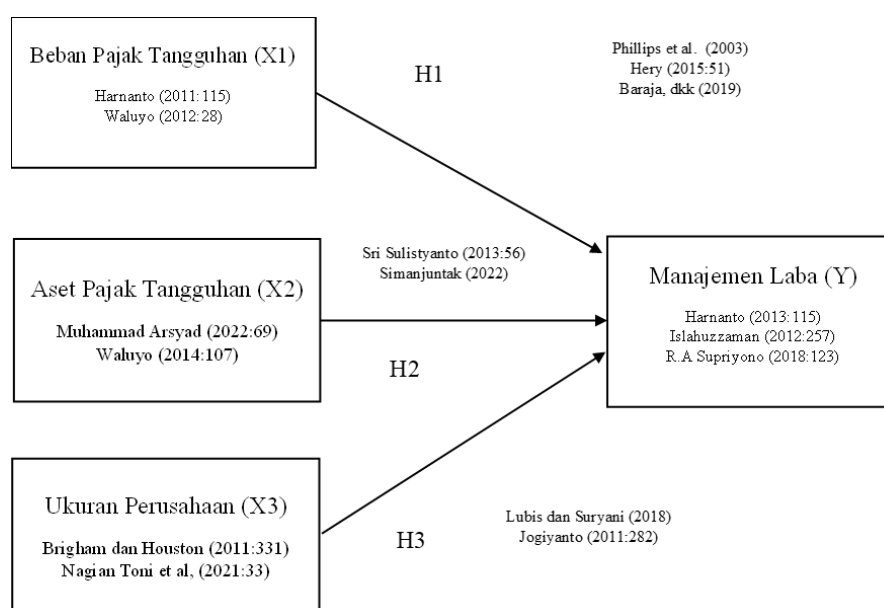
“Ukuran perusahaan adalah sebagai algoritma dari total aset diprediksi mempunyai hubungan negative dengan ratio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba yang ditahan”.

Pernyataan – pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018), Llukani (2013). Berdasarkan penelitian Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik laba. Penelitian yang dilakukan Llukani (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudhita

(2017) dan Gunawan (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis tiga (H3) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

Ha₂: Aset Pajak Tangguhan berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

Ha₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Manajemen Laba